

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki penduduk sangat banyak, serta letak geografis yang sangat luas membuat pemerintah sulit mencapai pemerataan pembangunan di setiap daerahnya. Pada daerah yang terpencil akan kalah bersaing dalam pembangunannya dengan daerah yang perkotaan, yang menyebabkan perbedaan kehidupan antara penduduk kota dan penduduk desa.<sup>1</sup>

Ketidakseimbangan yang tinggi membuat masyarakat pedesaan mencoba masuk ke kota untuk mempertaruhkan nasibnya dengan membawa bekal pendidikan alaminya dan kemampuan yang kurang. Menyebabkan penambahan populasi di kota-kota yang berdampak pada ketidakseimbangannya antara pertumbuhan penduduk dan peluang pekerjaan (Nur, 2019). Hingga berakhir tidak sedikit dari penduduk urbanisasi yang bertahan hidup dengan empati dari orang lain layaknya gelandangan dan pengemis.

Setiap individu atau masyarakat tentu menghendaki kondisi kehidupan yang aman tentram dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Kondisi seperti itu lazim disebut dengan sejahtera. Sejahtera merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan maka yang harus dijadikan prioritas adalah dengan menyelesaikan masalah kesenjangan atau permasalahan sosial yang ada. Salah satu permasalahan sosial adalah adanya gelandangan dan pengemis.

---

<sup>1</sup> Muhammad Rasyid and Timbul Dompok, 'Efektivitas Program Rehabilitasi Di Kota Batam', 2019, 1–10.

Pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980, menjelaskan gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan yang melanggar norma kehidupan pada masyarakat setempat, tidak memiliki rumah dan pekerjaan yang tetap, dan hidup berkelana ditempat umum, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan uang dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai macam cara atau alasan untuk mendapatkan empati dari orang sekitar.<sup>2</sup>

Adapun kriteria yang dimiliki dari gelandangan menurut Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial yaitu tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), tidak mempunyai tempat untuk tinggal yang permanen, tidak memiliki pendapatan yang pasti, serta tidak memiliki rencana masa depan anak-anaknya maupun dirinya, sedangkan kriteria dari pengemis yaitu mata pencariannya bergantung pada empati orang lain, berpakaian kumuh dan compang-camping, berada ditempat yang ramai, serta menggunakan antar sesama untuk membangkitkan rasa empati orang lain.<sup>3</sup>

Ada faktor-faktor yang melatar belakangi seorang individu dalam melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, seperti merantau dengan modal nekad, tidak memiliki keinginan untuk berusaha, cacat fisik, riwayat pendidikan yang kurang mumpuni, tidak adanya lapangan pekerjaan, serta adanya prinsip mengemis daripada menganggur (Dimas, 2013).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tyas Martika Anggriana and Noviyanti Kartika Dewi, 'Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis', *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7.1 (2016), 30–40  
<<https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i1.78>>.

<sup>3</sup> Anggriana and Dewi.

<sup>4</sup> Yulinda Prasetyo and Utami Dewi, 'Homeless and Beggar Social Rehabilitation At Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Yogyakarta', *Journal of Public Policy and Administration Research*, 4 (2019).

Akan tetapi, faktor utama yang mendominasi dari banyaknya gelandang dan pengemis saat ini adalah dari segi ekonomi. Banyak dari orang-orang mengemis dikarenakan kurang mampunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Gepeng (gelandangan dan pengemis) adalah peristiwa sosial yang harus diperhatikan dengan serius. Fenomena gelandangan dan pengemis tidak hanya terjadi pada daerah perkotaan besar saja, tetapi juga daerah-daerah pinggiran kota yang masih masuk kedalam wilayah strategis.

Untuk mengatasi fenomena gelandang dan pengemis ini, diperlukannya peningkatan keberfungsian bagi gelandangan dan pengemis melalui peningkatan *hard skill* dan *soft skill* sebagai penunjang hidup mereka nantinya dan peningkatan pendidikan agar mendapatkan penghidupan yang layak kelak.

Memberikan rehabilitasi sosial adalah memberikan tindakan dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada saat ini. Mengembalikan dan mengembangkan kembali potensi individu agar dapat melakukan fungsi sosialnya kembali dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, dikenal sebagai rehabilitasi sosial (Kartini Temanggung, 2016).<sup>5</sup>

Sri Yuni (2008) mengatakan rehabilitasi sosial adalah kumpulan kegiatan yang memiliki tujuan menyelesaikan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental dan sosial seseorang sehingga mereka dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Prasetyo and Dewi.

<sup>6</sup> Prasetyo and Dewi.

Seperti yang tertuang dalam Pergub Jawa Timur No. 85 Tahun 2018 pasal 62 tentang UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya memiliki tugas melakukan beberapa tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial bagi klien yaitu gelandangan dan pengemis, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pada rehabilitasi sosial nantinya, gelandangan dan pengemis akan diberikan keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. keterampilan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi sosial dari gelandangan dan pengemis yang ada pada saat ini. Seperti halnya yang terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia No.11 tahun 2009 pasal 7 terkait Rehabilitasi Sosial<sup>7</sup>, yang berbunyi "Rehabilitasi sosial memiliki maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik".

keterampilan ini penting adanya, mengingat di tahun 2022 jumlah gelandangan dan pengemis khususnya pada provinsi Jawa Timur hanya mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 1. 1 Jumlah kemiskinan provinsi Jawa Timur**

Kota/ Kab	Jumlah penduduk miskin menurut kab/ kota di Jawa Timur (Ribuan jiwa)		
	2021	2022	2023
Jawa Timur	4.572.73	4.181.29	4.188.81

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2023

<sup>7</sup> Nuraida Nuraida, 'Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang', *The World of Public Administration Journal*, 1.2 (2020), 148–65 <<https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>>.

Permasalahan yang kerap terjadi pada saat pengentasan gelandangan dan pengemis yaitu banyak ditemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS kembali lagi menjadi gelandangan dan pengemis, setelah selesai mendapatkan rehabilitasi sosial.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada PMKS yaitu lemahnya motivasi yang ada dalam diri PMKS sehingga tidak ada kemauan yang kuat untuk keluar dari jalanan<sup>8</sup>. Selain itu, jumlah pegawai yang kurang seimbang dengan jumlah warga binaan, serta metode pemberian layanan bimbingan yang kurang tepat sasaran, menjadi masalah yang kerap terjadi dilapangan.

Hal ini juga terjadi pada rehabilitasi sosial bina karya yang ada di Pasuruan. Klien atau penerima manfaat disana sulit untuk melakukan rehabilitasi karena kurangnya motivasi atau dorongan dari diri mereka untuk dapat merubah diri menjadi lebih baik dan mendapat penghidupan yang layak. Tidak jarang dari klien atau penerima manfaat disana untuk pergi keluar atau kabur dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya karena tidak dapat menyesuaikan diri ataupun tidak tertarik dengan program rehabilitasi yang ada disana.

Untuk itu perlukannya monitoring serta penilaian setiap saatnya untuk mengukur serta mengevaluasi setiap program keterampilan yang ada agar dapat berjalan dengan efektif dan optimal, serta agar tercapainya sasaran utama dari program keterampilan tersebut.

---

<sup>8</sup> Mita Rachmawati and Ety Rahayu, 'Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja Di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi', *Jurnal Pembangunan Manusia.*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.7454/jpm.v1i1.1003>>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana efektivitas program bimbingan keterampilan dalam meningkatkan fungsi sosial bagi gelandangan dan pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan?
- 2) Apa faktor penunjang dan penghambat keefektivitasan program keterampilan yang ada pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tingkatan efektivitas program bimbingan keterampilan dalam peningkatan fungsi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan, serta faktor penunjang dan penghambatnya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1) Manfaat Praktis

Sebagai referensi untuk evaluasi dimasa mendatang untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan keterampilan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya di Pasuruan.

### 2) Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan maupun pendidikan khususnya dalam kajian Rehabilitasi Sosial Bina Karya.

